

# **BAB I**

## **PEDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Setiap Negara memiliki tujuan yang sama yaitu mensejahterakan warga negaranya, memiliki perekonomian yang kuat dan pembangunan yang merata. Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan negara dan indikator suksesnya pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang terurukur dan terarah. Tujuan nasional Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Indonesia sebagai Negara berkembang sangat menyadari bahwa masalah yang harus dipecahkan adalah kemiskinan yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia.

Masing-masing negara memiliki kendala yang berbeda dalam mensejahterakan masyarakatnya, namun yang paling umum adalah kemiskinan. Kemiskinan terjadi karena adanya perbedaan kemampuan masyarakat sebagai pelaku ekonomi, sehingga menciptakan perbedaan peran masyarakat dalam proses pembangunan. Kemiskinan menjadi suatu persoalan mendasar yang harus dipecahkan oleh pemerintah Indonesia dalam pembangunan agar tidak menghambat terciptanya kehidupan yang adil dan sejahtera. Kemiskinan dapat dijadikan gambaran umum tentang kondisi perekonomian di banyak negara berkembang. Dikarenakan menurunnya angka kemiskinan dapat dijadikan indikator sebagai keberhasilan dalam pembangunan.

Badan Pusat Statistik (BPS, 2018) mendefinisikan kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan standar hidup minimum yang berupa kebutuhan makanan atau non makanan, dengan membandingkan tingkat konsumsi dengan garis keiskinan atau jumlah pengeluaran untuk konsumsi perbulan.

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan bersifat multidimensial. Oleh karena itu, untuk mengatasi kemiskinan harus menyeluruh dan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat serta dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara terpadu. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan permasalahan yang baru di masyarakat. Pembangunan yang merata merupakan salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia, baik secara ekonomi maupun non ekonomi.

Menurut Reynell dalam Rosiana dan Suryani (2012), pembangunan di bidang ekonomi adalah kunci dalam menentukan tingkat kemiskinan karena terdapat siklus yang jelas antara siklus bisnis dengan pertumbuhan kemiskinan. Apabila sebuah negara memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat maka akan memperbanyak kesempatan kerja dan mengurangi jumlah pengangguran, sehingga kemiskinan menurun. Sedangkan pembangunan bidang non ekonomi dapat berupa pembangunan manusia yang bertujuan agar tercipta penduduk yang memiliki pendidikan, kesehatan dan kehidupan yang layak. Dengan pembangunan tersebut akan berdampak positif terhadap penduduk di Indonesia yaitu tercapainya kemakmuran.

Mengutip pendapat Kuncoro (2003), pertumbuhan ekonomi, pendidikan yang terlampaui redah, keterbatasan sumber alam, terbatasnya lapangan kerja, keterbatasan modal dan beban keluarga, kesemua faktor tersebut merupakan *vicious circle* (lingkaran setan) dalam masalah timbulnya kemiskinan.

Kemiskinan masih terjadi pada sebagian besar daerah di Indonesia. Hal ini terjadi karena banyaknya daerah di Indonesia yang termasuk dalam katagori daerah terbelakang. Penyebab lain dikarenakan pembangunan yang terjadi belum merata dan belum menjangkau seluruh pelosok negeri.

Di Jawa Timur khususnya Pulau Madura yaitu; Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep masih banyak penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan mereka secara maksimal. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pendapatan yang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari atau dapat dikatakan pendapatan yang diperoleh belum cukup memenuhi kebutuhan mereka yang lain. Penyebabnya adalah sebagian besar penduduk di Madura masih mengandalkan sektor pertanian sebagai sektor andalan mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pembangunan jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Madura dengan Surabaya diharapkan membantu tumbuhnya perekonomian di Pulau Madura nyatanya belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat di Pulau Madura. Hal ini dikarenakan pemerataan pembangunan yang terjadi belum menyeluruh, sehingga angka kemiskinan di Pulau Madura masih tinggi.

Berdasarkan hasil Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Provinsi Jawa Timur dari Bank Indonesia (2018:112) menunjukkan bahwa di Jawa Timur pada tahun 2018 memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 4,29 juta jiwa atau 10,85% dari total penduduk. Sedangkan daerah-daerah di Pulau Madura masih berada dalam garis kemiskinan dengan rata-rata sebesar 18,86% pada tahun 2018. Adapun berdasarkan data informasi BPS, di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2017 memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 206,53 ribu jiwa atau 21,32% dari total penduduk, di Kabupaten Sampang pada tahun 2017 memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 225,13 ribu jiwa atau 23,56% dari total penduduk, di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2017 memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 137,77 ribu jiwa atau 16,00% dari total penduduk dan di Kabupaten Sumenep pada tahun 2017 memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 211,92 ribu jiwa atau 19,62% dari total penduduk. Sedangkan pada tahun 2018 di Kabupaten Bangkalan memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 191,33 ribu jiwa atau 19,59% dari total penduduk, di Kabupaten Sampang pada tahun 2018 memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 204,82 ribu jiwa atau 21,21% dari total penduduk, di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2018 memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 125,76 ribu jiwa atau 14,47% dari total penduduk dan di Kabupaten Sumenep memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 218,60 ribu jiwa atau 20,16% dari total penduduk.

Jika dibandingkan pada tahun sebelumnya maka di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pamekasan mengalami

penurunan, namun di Kabupaten Sumenep mengalami kenaikan. Di Kabupaten Bangkalan mengalami penurunan sebesar 1,73%, Kabupaten Sampang mengalami penurunan sebesar 2,35% dan di Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan sebesar 1,53% sedangkan di Kabupaten Sumenep mengalami kenaikan 0,54%. Hal tersebut menggambarkan bahwa di Pulau Madura masih memiliki tugas yang sangat berat agar angka kemiskinan mengalami perubahan yang signifikan dan merata.

Keparahan kemiskinan dapat dikatakan sebagai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Adanya permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI KABUPATEN BANGKALAN, SAMPANG, PAMEKASAN DAN SUMENEP”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Atas dasar permasalahan diatas maka persoalan yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah tingkat pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep?
2. Apakah pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep?
3. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.
3. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap.

1. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan yang mendalam bagi penulis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Pulau Madura. Dan secara umum dapat menambah wawasan tentang mata kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Bagi Almamater, penelitian ini diharapkan dapat menambah kebendaharaan di perpustakaan sebagai referensi bagi mahasiswa yang mengkaji topik sejenis dengan penelitian ini.
3. Bagi instansi pemerintahan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tambahan bagi Pemerintah Pusat atau Daerah sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan di masa yang akan datang untuk mengatasi masalah kemiskinan.